

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penergerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

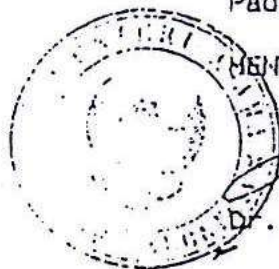
M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1475 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Ri
Munt
Dr. H. JAHIZI TAHER

Tembusan :

1. Monko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

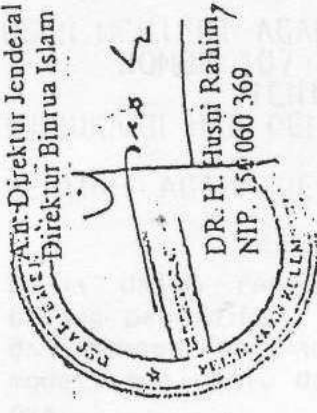
LAMPIRAN DOKUMEN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
 NOMOR : 42/E.M/PP.01.1/ED/II/1997
 TANGGAL 03 FEBRUARI 1997

NO	PROVINSI	NOMOR URUT MAD	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB/KODYA	KET
10	Jawa Tengah	127	26 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jambusari	Madrasah Ibtidaiyah Swasta G U P P I Ds. Jambusari Kec. Jeruk Legi Kab. Cilacap	Kab. Cilacap	
		128	27 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Segaralangu	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Huda Ds. Segaralangu Kec. Ciparib Kab. Cilacap	Kab. Cilacap	
		129	28 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sidanegara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darwata Ds. Sidanegara Kec. Kedungreja Kab. Cilacap	Kab. Cilacap	
		130	29 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dayeuh Luhur	Madrasah Ibtidaiyah Swasta LKMD Ds. Dayeuh Lunur Kec. Dayeuh Luhur Kab. Cilacap	Kab. Cilacap	
		131	30 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sikanjo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sikanco I Ds. Sikanjo Kec. Nusawungu Kab. Cilacap	Kab. Cilacap	
		66	2 Madrasah Tsanawiyah Negeri Nusawungu	Madrasah Tsanawiyah Swasta Jenderal Sudirman Ds. Karang Pakis Kec. Nusawungu Kab. Cilacap	Kab. Cilacap	
		89	3 Madrasah Tsanawiyah Negeri Pelanjan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Islamiah YAPPI Ds. Pelanjan Kec. Kesugihan Kab. Cilacap	Kab. Cilacap	

NO	PROPINSI	NOMOR		PERUBAHAN DARI	KAB./KODYA	KET
			URUT MAD			
		22	9	Madrasah Aliyah Negeri Cilacap Filial di Kroya, Kab. Cilacap Kec. Kroya	Kab. Cilacap	

Jakarta, 13 Februari 1997

Dr. H. Husni Rahim
 Direktur Jenderal
 Direktorat Binrua Islam



DR. H. Husni Rahim
 NIP. 150 060 369



DEPARTEMEN AGAMA RI.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pahlawan No. 5 Tlp. 26379
SEMARANG

Pengesahan Petguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a.) Bahwa dalam rangka Pembinaan Plagam Wajib Belajar/Plagam Pendidikan dan Bantuan pada khususnya perlu adanya pembinaan kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur.

MENYIANGGAT : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam kewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwalban, Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963,
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964,
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964,
4. Instruksi Dirpenda Jakarta Ig. 1-2-1970 No. 130/I/Pda/013,
5. D.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1951.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta Igl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Madrasah Jalamiyah / S. I.

Jenis & Obek : Ibtidaiyah

Alamat : Desa Jambusari Jeruklegi.

Didirikan tahun

1980.

Dibawah asuhan dan bimbingan hukum : Jemaah Jum'at Umat, Jalan Da-
tehirahy mulia tangga 11-1-75 : an Jambusari Jeruklegi.

Telah diajui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PER-
GURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 1/1208/III/75
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dike-
tahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 1. Januari. 1975.

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL.